

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmad Yani, 2013, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Responsif, Konstitusi Press, Jakarta.
- Aziz Syamsudin, 2011, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-undang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bagir Manan, 1992. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill.Co, Jakarta.
- Bagir Manan, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta.
- Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Farida, Maria, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Fauzan, Muhammad, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Uii Press, Yogyakarta.
- Haw Widjaja, 1992, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II Cetakan Pertama*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, BIP, Jakarta
- Kusnu Goesniadhie. *Harmonisasi dalam Persepektif Perundang-undangan (lex Spesialis Masalah. 2006)* Surabaya.
- Mahfud MD, 2014, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta
- Maria Farida, 1998, *Ilmu Peundang-undangan*, Kanisius, Jakarta.
- Maria SW Sumardjono, 2014, “Metodologi Penelitian Ilmu Hukum”, *Bahan Kuliah*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Moh.Kusnardi dan Bintang R. Saragih, 2006, *Ilmu Negara*, Cetakan keenam, Gaya Media Pratama, Jakarta.

- Muh. Yamin, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ni'matul Huda, 2014, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Petrus C.K.L. Bello, *Hukum dan Moralitas tinjauan Filsafat Hukum*, Erlangga, 2012, Jakarta.
- Prajudi Admosudirdjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, dan Sri Mahmudi, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sudaryo Gautama, 1983, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung.
- Suhariyono, Peranan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyusunan Prolegda.
- Sumardjono, Maria SW., 2014, "Metodologi Penelitian Ilmu Hukum", *Bahan Kuliah*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Tim Lapera, Otonomi Pemberian Negara, *Kajian Kritis Atas Kebijakan Otonomi Daerah*, (Jakarta : Lapera Pustaka Utama, 2001)
- Von Schmid, 1998, *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara Hukum*, cetakan Keenam, PT. Pembangunan, Jakarta.
- Wahidin, Samsul, 2013, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pendulum Otonomi Daerah dari Masa ke Masa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Widjaja, Haw, 1992, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II Cetakan Pertama*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

B. Tesis dan Jurnal

- Dina M. Sirait, *Jurnal Legislasi Indonesia : Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Legislasi Daerah dan Kaitannya dengan Pembentukan Peraturan Daerah yang Berpihak Kepada Masyarakat*,

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2013)

Susanti Yuliandari, “Fungsi dan peran Kantor wilayah Departemen hukum dan hak asasi manusia Pendidikan Propinsi D.I. Yogyakarta dalam harmonisasi produk hukum daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta”, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2010.

Tesis Unan Pribadi, *Mekanisme Harmonisasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi DIY*, 2010, Perpustakaan FH UGM, Yogyakarta.

C. Internet

https://www.academia.edu/22966603/Analisis_Perubahan_Pokok_UndangUndang_Nomor_32_Tahun_2004_Dengan_UndangUndang_Nomor_23_Tahun_2014_Tentang_Pemerintahan_Daerah?auto=download

<http://www.djpp.depkuham.go.id/files/laporan/2017/laporanrakernis2017.pdf> diakses pada tanggal 30 November 2018 pukul 18.00 Wib.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara RI No. 5587).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI tahun 2011 nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234).

Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaannya

Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana UU No. 12 Tahun 2011.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 30 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Permenkumham No. 29 Tahun 2015 Pasal 141 Tentang Organisasi Tata Kerja Kemenkumham.

Permenkumham No. 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.